ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Diajukan oleh :

Sinta Yuningsih

NIM. 07011181823181

Konsentrasi Keuangan Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

September 2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

"ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

SINTA YUNINGSIH

07011181823181

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, September 2023

Pembimbing I

Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
NIP. 197808182009121002

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENYERAPAN ANGGARAN DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019"

SKRIPSI

Oleh :

SINTA YUNINGSIH

07011181823181

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 27 September 2023

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
   NIP. 197808182009121002

2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
   NIP. 198106082008122002

Dosen Penguji :

1. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
   NIP. 196911101994011001

2. Dr. Nengyanti, M. Hum
   NIP. 196704121992032002

Mengetahui,

Dekan Fisip UNSRI	Ketua Jurusan
Prof. Dr. Alfitri, M.Si	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196601221990031004	NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Sinta Yuningsih
NIM	: 07011181823181
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sawahlunto Sijunjung, 5 Maret 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik dari Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lainnya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, September 2023
Yang membuat surat pernyataan

Sinta Yuningsih
07011181823181

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Sesulit apapun harimu besok, pasti akan berlalu jua. Tidak ada kemudahan kecuali Allah SWT yang menjadikannya mudah”

(Sinta Yuningsih)

“Sepiro Gedene Sengsoro Yen Tinompo Among Dadi Cubo”

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

1. **Kedua Orang Tua Saya, Ayah dan Ibu Tercinta**
2. **Kedua Adikku Tersayang**
3. **Sahabat-sahabatku Terkasih**
4. **Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 hanya mampu menyerap anggaran 74,22% dari 100% jumlah yang di anggarkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyerapan anggaran dan Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Tahun 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori institusional dengan konsep dari Hasni & Basukianto yaitu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran meliputi faktor perencanaan, pencairan dana, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa dan regulasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 ialah faktor perencanaan yang tidak tepat, keterbatasan koneksi jaringan di satuan kerja dan kesulitan menentukan HPS karena harga penawaran yang lebih kecil dari HPS menyebabkan sisa anggaran tidak terserap. Saran dari penelitian ini adalah supaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lebih mempersiapkan perencanaan dengan tepat, menambah akses jaringan, dan melakukan survey pasar atau riset terlebih dahulu sebelum menentukan HPS agar jumlah yang dianggarkan dapat dialokasikan dengan baik.

Kata Kunci : Penyerapan anggaran, faktor perencanaan, pencairan dana, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengadaan barang dan jasa dan regulasi.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si	Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121002	NIP. 198106082008122002

Indralaya, September 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

Budget absorption at the Regional Financial and Asset Management Agency in 2019 was only able to absorb 74.22% of the budget from 100% of the budgeted amount. This research was conducted to determine the budget absorption process and the factors causing the low budget absorption in 2019 at the Regional Financial and Asset Management Agency of Ogan Ilir Regency. This research uses institutional theory with a concept from Hasni & Basukianto, namely factors that influence budget absorption including planning factors, disbursement of funds, human resources, information technology, procurement of goods and services and regulations. The research method used is qualitative. Data collection techniques consist of interviews and documentation. The results of this research show that the factors causing low budget absorption in the Regional Financial and Asset Management Agency of Ogan Ilir Regency in 2019 are inappropriate planning factors, limited network connections in work units and difficulty determining HPS because the bid price is smaller than the HPS causing residual budget not absorbed. The suggestion from this research is that the Regional Financial and Asset Management Agency should prepare more appropriate planning, increase network access, and conduct a market survey or research first before determining the HPS so that the budgeted amount can be allocated properly.

Keywords: Budget absorption, planning factors, disbursement of funds, human resources, information technology, procurement of goods and services and regulations

Advisor I

Dr. Alamsyah, S.IP.,M.Si
NIP. 197808182009121002

Advisor II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Indralaya, September 2023

Chairman of the Departement of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019". Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada hamba.
2. Kedua orang tua saya, cinta pertamaku Bapak Sugeng Purnomo dan pintu surgaku Ibu Rohmiati yang mampu mendidik dan selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Prof. Dr. Alfitri, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
5. Bapak Dr.Alamsyah, S.ip., M.Si sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberi waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Sholahudin, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir beserta seluruh jajarannya yang telah turut membantu dalam penelitian ini.
8. Seluruh Staf beserta karyawan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
9. Kepada sahabat tercinta GCawa yaitu mbak Alfika Faltdila Rizky Putri S.Pd, mbak Dea Melinia S.P dan mbak Hosia Turobba S.P yang sudah saya anggap seperti keluarga kedua di perantauan dan selalu memberikan dukungan, do'a serta bersedia menampung segala cerita perjuangan dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada dulur PSHT Universitas Sriwijaya mbak Dian, mbak Febi, mbak Nilam, mbak Ana, mbak Ayu, mbak Ika, mas Adit, mas Marta, mas Ian, mbak Indira, mbak Sakia dan segenap keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Terate Universitas Sriwijaya
11. Kepada sahabat saya Deva Jelita dan Feby Ferinica, terimakasih sudah menjadi sahabat dan teman yang bersedia menampung keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati

penulis sangat berterimakasih terhadap kritik dan saran yang diberikan. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat memberikan kebermanfaatan di kemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indralaya, September 2023

Sinta Yuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI iii
MOTTO & PERSEMBAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
DAFTAR SINGKATAN xv
BAB 1PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
BAB IITINJAUAN PUSTAKA 12
A. Landasan Teori 12
1. Teori Institusional 12
2. Keuangan Negara 14
3. Ruang Lingkup Keuangan Negara 15
4. Anggaran 16
5. Penyerapan Anggaran 17
6. Sistem Penganggaran di Indonesia 18
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran 18
1. Faktor Perencanaan 19
2. Faktor Proses Pencairan Dana 20
3. Faktor Sumber Daya 20
4. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa 22

5. Faktor Regulasi 23
C. Penelitian Terdahulu 24
D. Teori yang Digunakan dalam Penelitian 30
E. Kerangka Pemikiran 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Definisi konsep 37
C. Fokus Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 41
E. Informan Penelitian 42
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Analisis Data 43
H. Sistematika Penulisan 44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 47
2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 48
3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 48
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 51
5. Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 73
6. Sumber Daya Manusia 75
B. Hasil Penelitian 77
1. Proses Penyerapan Anggaran 77
2. Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran 78
C. Pembahasan 124
BAB V KESIMPULAN 127
A. Kesimpulan 127
B. Saran 128
DAFTAR PUSTAKA 130
LAMPIRAN 133

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017-2019 4
Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 5
Tabel 3 Kegiatan yang memiliki persentase penyerapan anggaran kisaran 80% sampai 80% kebawah pada tahun anggaran 2019 5
Tabel 4 Daftar Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2017 6
Tabel 5 Daftar Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2018 7
Tabel 6 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 25
Tabel 7 Fokus Penelitian 39
Table 8 Sumber Daya BPKAD Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan .. 76
Tabel 9 Sumber Daya BPKAD Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Eselon/Jabatan 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 35
Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 50
Gambar 3 Proses penyerapan anggaran BPKAD 78
Gambar 4 Hasil tahapan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan 80
Gambar 5 Hasil analisis data primer regulatif perencanaan 82
Gambar 6 Hasil analisis data primer sanksi perencanaan 84
Gambar 7 Hasil analisis data primer evaluasi perencanaan 85
Gambar 8 Hasil analisis data primer kewajiban perencanaan 88
Gambar 9 Hasil analisis data primer kognitif budaya perencanaan 89
Gambar 10 Hasil analisis data primer SOP pencairan dana 91
Gambar 11 Hasil analisis data primer sanksi pencairan dana 92
Gambar 12 Hasil analisis data primer evaluasi pencairan dana 93
Gambar 13 Hasil analisis kewajiban pencairan dana 94
Gambar 14 Hasil analisis data primer kognitif budaya pencairan dana 95
Gambar 15 Hasil analisis regulatif SDM 98
Gambar 16 Hasil analisis data primer sanksi SDM 100
Gambar 17 Hasil analisis data primer evaluasi SDM 101
Gambar 18 Hasil analisis data primer kewajiban SDM 102
Gambar 19 Hasil analisis data primer kognitif budaya SDM 103
Gambar 20 Hasil analisis data primer regulatif TI 105
Gambar 21 Hasil analisis data primer sanksi TI 106
Gambar 22 Hasil analisis data primer evaluasi teknologi informasi 108
Gambar 23 Hasil analisis data primer kewajiban teknologi informasi 109
Gambar 24 Hasil analisis data primer kognitif budaya teknologi informasi 109
Gambar 25 Rekap pengadaan di BPKAD Ogan Ilir tahun 2019 113
Gambar 26 Hasil evaluasi data primer regulasi PBJ 113
Gambar 27 Hasil analisis data primer evaluasi PBJ 115
Gambar 28 Hasil analisis data primer kewajiban PBJ 116
Gambar 29 Hasil analisis data primer regulasi 118
Gambar 30 Hasil analisis data primer sanksi regulasi 119
Gambar 31 Hasil analisis data primer evaluasi regulasi 121
Gambar 32 Hasil analisis data primer kewajiban regulasi 122
Gambar 33 Hasil analisis data primer kognitif budaya regulasi 123

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Dokumentasi Penelitian

Pedoman Wawancara

Surat Tugas Dosen Pembimbing

Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 1

Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Dosen Pembimbing 2

Lembar Perbaikan Seminar Proposal

Surat Balasan Izin Penelitian

Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1

Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
KDH	: Kepala Daerah
KUA	: Kebijakan Umum APBD
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
SDGs	: *Sustainable Development Goals*
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU	: Undang-Undang
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
PP	: Pejabat Pengadaan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Kabag	: Kepala Bagian
Kasubag	: Kepala Subbagian
Renja	: Rencana Kerja
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
KUAPPAS	: Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DID	: Dana Insentif Daerah
Musrembang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SiRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menyepakati dokumen pembangunan universal tersebut yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 319 Indikator (Sekar, 2015:4) yang tercakup menjadi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola secara terintegrasi. Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam pembangunan institusi atau kelembagaan di Indonesia termasuk ke SDGs ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Target pembangunan berkelanjutan tersebut adalah untuk mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk, membangun institusi yang akuntabel dan transparan, serta pengambilan keputusan yang responsif, inklusif partisipatif dan representatif di semua level. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan patuh terhadap peraturan undang-undang.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berusaha untuk melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mendorong

pembangunan nasional yang lebih maju. Sebagai negara yang masih berkembang, negara Indonesia harus mampu melaksanakan setiap program kegiatan untuk menunjang keberhasilan negara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai dengan baik. Penjelasan umum Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuannya melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Anggaran berperan vital dan relevan dalam pemerintahan, karena dampaknya terhadap kinerja pemerintah secara intrinsik terkait dengan penyediaan layanan kepada masyarakat, yang merupakan fungsi fundamental pemerintah. Anggaran berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja oleh lembaga dan lembaga pemerintah. Tidak adanya anggaran akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan sepenuhnya, dan dalam beberapa kasus, bahkan tidak berjalan sedikitpun. Akibatnya, anggaran berdiri sebagai elemen paling penting dalam pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Bagi instansi pemerintah, anggaran memegang peran penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah terancang. Sebagai organisasi publik, anggaran Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah berasal dari dari keuangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 1. Undang-undang ini menguraikan bahwa semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai secara moneter, di samping semua barang yang dapat digunakan sebagai milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban ini, termasuk dalam lingkup negara. Oleh karena itu, pengeluaran anggaran harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Kemudian ditekankan kembali pada Pasal 3, Paragraf 1, yang menyatakan bahwa Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, sesuai dengan undang-undang yang ditentukan, sementara juga memastikan efisiensi, penghematan, kemanjuran, transparansi, dan tanggung jawab, semua sambil menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepatutan. Akibatnya, ketika menyusun rencana implementasi anggaran, penting untuk mempertimbangkan kemanjuran pengeluaran anggaran organisasi. Sesuai perspektif Mardiasmo (2009), efektivitas secara intrinsik terkait dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan hasil kegunaan, dan efektivitas inilah yang dapat ditentukan oleh korelasi antara output dan tujuan yang perlu dicapai.

Pemanfaatan dana fiskal dalam proses pemerintah untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja tertentu merupakan pelaksanaan anggaran. Implementasi dari setiap kegiatan tertentu mengharuskan alokasi anggaran. Penjatahan dana bervariasi antar lembaga dan lembaga sesuai dengan persyaratan menyesuaikan kebutuhan mereka. Pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa tahap yang harus dilaksanakan, dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Pemanfaatan anggaran harus diteliti untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan sangat penting untuk upaya operasional dan

program lembaga.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan anggaran layaknya instansi pemerintah lainnya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peranan yang penting dalam memberikan layanan optimal dibidang keuangan dan aset daerah. Anggaran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir termasuk dalam kategori berjumlah dua puluh empat milyar rupiah. Menyesuaikan dengan program kerja di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah itu sendiri.

Berikut Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir :

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017-2019

(dalam milyar rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase serapan anggaran
2017	33.192.913.622,13	12.709.176.070,00	38,29 %
2018	16.714.960.408,52	13.248.804.037,00	79,26 %
2019	24.912.608.466,62	18.491.298.217,00	74,22 %

Sumber : LRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2017-2019

Berdasarkan Tabel 1 target dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2017 sampai tahun 2019 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tergolong kurang efektif. Meskipun anggaran dan realisasi pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun jumlah tersebut masih tergolong belum optimal.

Berikut adalah tabel daftar isian penggunaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 :

Tabel 2 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Program Kerja	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Persentase
Program Pelayanan Administrasi Kantoran	1.530.116.000	1.466.055.863	95,81 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	796.984.000	763.568.482	95,81 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115.000.000	104.476.396	90,85 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	47.125.000	41.200.750	87,43 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.995.187.500	3.367.464.066	84,29 %
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	993.650.000	905.302.896	91,11 %
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	65.778.500	59.997.475	91,21 %

Sumber : LRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Apabila dilihat dari target dan realisasi berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa kegiatan yang memiliki jumlah penyerapan anggaran jauh dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 3 Kegiatan yang memiliki persentase penyerapan anggaran kisaran 80% sampai 80 % kebawah pada tahun anggaran 2019

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.0000	10.156.716	56,43 %
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000	5.438.050	36,25 %
Penyedia komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13.000.000	10.215.000	78,58 %
Penyedia makanan dan minuman	30.000.000	22.140.000	73,80 %
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	30.000.000	19.995.000	66,65 %
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	10.000.000	873.000	8,73 %

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	258.761.000	163.840.511	63,32 %
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	240.690.000	187.307.976	77,82 %
Revisi peraturan bupati tentang APBD	77.475.000	46.924.250	60,57 %
Penyusunan peraturan bupati tentang bagan akun standar	20.000.000	11.178.000	55,89 %
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	48.000.000	36.680.200	76,42 %
Mentoring / Pengendalian/ penertiban barang milik daerah	27.155.000	21.936.900	80,78 %
Penyusunan KUA dan PPAS APBD	185.690.000	109.029.200	58,72 %
Perencanaan penganggaran keuangan berbasis elektronik (*E-Budgeting*)	150.000.000	46.663.611	31,11 %
Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan aset daerah	57.200.000	33.707.425	58,93 %

Sumber : LRA Definitif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat 7 rencana program dan 15 kegiatan dalam program tersebut memiliki penyerapan dibawah 80%. Apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada 2 tahun sebelumnya maka pada tahun 2019 tersebut terjadi kenaikan jumlah anggaran namun mengalami penurunan pada jumlah anggaran yang terealisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Daftar Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2017

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	38.176.274,00	84,84
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86
Penyediaan makanan dan minuman	20.680.000,00	12.000.000,00	58,03
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	20.000.000,00	14.690.000,00	73,45

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	8.250.000,00	82,50
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	250.386.000,00	208.763.782,00	83,38
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	265.033.000,00	245.636.724,00	92,68
Revisi peraturan bupati tentang APBD	65.148.000,00	5.950.000,00	9,13
Penyusunan peraturan bupati tentang bagan akun strandar	13.980.000,00	9.742.000,00	69,69
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	20.000.000,00	12.920.000,00	64,60
Mentoring / Pengendalian/ penertiban barang milik daerah	39.400.000,00	36.700.000,00	93,15

Sumber : LRA Definitif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

Tabel 5 Daftar Anggaran dan Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2018

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.000.000,00	4.673.977,00	31,16
Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28.300.000,00	5.115.000,00	18,07
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000,00	6.450.000,00	92,14
Penyediaan makanan dan minuman	21.000.000,00	18.210.000,00	86,71
Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	12.040.000,00	11.730.000,00	97,43
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	8.392.000,00	83,92
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	447.865.000,00	409.508.629,00	91,44
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD & Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	416.135.000,00	413.189.000,00	99,29

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Revisi peraturan bupati tentang APBD	15.000.000,00	13.187.500,00	87,92
Penyusunan peraturan bupati tentang bagan akun standar	20.000.000,00	14.494.884,00	72,47
Pemanfaatan Barang Milik Daerah	40.000.000,00	37.036.600,00	92,59
Mentoring / Pengendalian/ penertiban barang milik daerah	30.000.000,00	28.398.068,00	94,66
Penyusunan KUA dan PPAS APBD	63.750.000,00	41.023.258,00	64,35
Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan aset daerah	52.500.000,00	30.751.500,00	58,57

Sumber : LRA Definitif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 dapat ketahui bahwa kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS APBD dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dianggarkan pada tahun 2018. Sedangkan kegiatan perencanaan penganggaran keuangan berbasis elektronik (*E-Budgeting*) merupakan kegiatan yang baru dianggarkan pada tahun 2019.

Penyerapan anggaran yang kurang baik pada 15 kegiatan dari 7 program kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentu saja dapat menyebabkan rendahnya penyerapan belanja karena jumlah yang terealisasi tidak sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan sebelumnya. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan penyerapan anggaran telah menyebabkan menghilangnya manfaat pengeluaran, dikarenakan tidak semua dana yang ditugaskan dapat digunakan. Alokasi anggaran yang memadai dapat memungkinkan optimalisasi sumber dana terbatas yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai usaha strategis lainnya. Kelangkaan penerimaan daerah mengharuskan pemerintah daerah membentuk hierarki agenda program dan alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Hal ini mengindikasikan telah terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carsidiawan, 2009 dalam Rerung et al., 2017:193)

Penyerapan anggaran mengacu pada aktualisasi rencana anggaran yang dirumuskan sebelumnya. Proses ini dilaksanakan dengan efisiensi maksimal sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi dan Lembaga yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Namun realisasinya anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 masih memiliki jumlah realisasi anggaran dibawah pagu anggaran yang telah ditetapkan bahkan jumlah yang terealisasi di beberapa kegiatan masih tergolong kurang efektif.

Beberapa riset sudah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran, dimulai dari faktor perencanaan anggaran & kegiatan (Hasni & Basukianto, 2016; Rahmawati & Ishak, 2020; Wiansyah & Mulyani, 2021; Widianingrum, dkk, 2017; Trisna, dkk, 2020; Oktaliza, dkk, 2020; Tofani, dkk, 2020; Gagola, dkk, 2017; Andri, dkk, 2019), faktor pengadaan barang & jasa ((Hasni & Basukianto, 2016; Rahmawati & Ishak, 2020; Wiansyah & Mulyani, 2021; Widianingrum, dkk, 2017; Trisna, dkk, 2020; Tofani, dkk, 2020; Gagola, dkk, 2017; Andri, dkk 2019), faktor e-perocurement (Rerung, dkk, 2017), faktor sumber daya manusia (Hasni & Basukianto, 2016; Rahmawati & Ishak, 2020; Wiansyah & Mulyani, 2021; Widianingrum, dkk 2017; Trisna, dkk, 2020; Oktaliza, dkk, 2020; Tofani, dkk, 2020), faktor Regulasi (Hasni & Basukianto, 2016; Rahmawati & Ishak, 2020; Widianingrum, dkk, 2017; Oktaliza, dkk, 2020; Andri, dkk,2019), faktor Pelaksanaan Anggaran (Rahmawati & Ishak, 2020; Wiansyah & Mulyani, 2021; dan Gagola, dkk, 2017), faktor birokrasi (Rerung, dkk, 2017 dan Gagola, dkk 2017). Faktor administrasi (Hasni & Basukianto, 2016; Widianingrum, dkk, 2017; dan Tofani, dkk, 2020), faktor perpindahan pegawai (Andri, dkk 2019), faktor terlambatnya pengesahan APBD & faktor PON ke XVIII di Provinsi Riau tahun 2012 (Andri, dkk 2019), faktor komitmen manajemen (Rerung, dkk, 2017; Oktaliza, dkk, 2020; Tofani, dkk 2020; Gagola, dkk, 2017). Meskipun begitu, belum ada yang menjelaskan proses penyerapan

anggaran dan meneliti kontribusi faktor perencanaan, proses pencairan dana, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, dan regulasi dengan menggunakan analisis teori institusional dalam menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan anggaran. Penelitian ini memiliki pembaruan dari penelitian terdahulu yaitu dengan menganalisis faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

Setelah melihat fenomena yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti "**Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (a) bagaimana proses penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir? (b) faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

a) untuk menganalisis proses penyerapan anggaran dan
b) mengetahui faktor–faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan di bidang Administrasi Publik khususnya di bidang Keuangan Negara untuk mengetahui hal–hal yang berkaitan dengan Proses Penyerapan Anggaran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam hal Penyerapan Anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aldita, Said Muniruddin, A. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sdm, Pemahaman Atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Skpd Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasisswa Ekonomi Akuntnasi (JIMEKA)*, *3*(1), 82–95.

Allison dan Kaye. (2005). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Yayasan Obor Indonesia.

Andri, A., Harun, A., & Dompak, T. (2019). Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012. *Jurnal Dialektika Publik*, *3*(2), 17–25.

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Indonesia: Erlangga.

Bogdan dan Taylor. (1999). *Pengantar Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Aditya.

Bungin, B. (2001). *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Raja Grafindo Persada.

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika.

Di Maggio, P. J. dan W. W. P. 1983. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160.

Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8*(1), 108–117. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330

Juliani, D., & Sholihin, M. (2014). Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual Terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *11*(2), 177–199. https://doi.org/10.21002/jaki.2014.10

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andri

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mtsweni, E. S. A., & Khan, A. I. (2020). Mekanisme Pencairan Dana Anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. *Engineering, Construction and Architectural Management*, *25*(1), 1–9.

Nawawi, H. H. (2002). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Graha Indonesia.

Nurwidya, S. R., & Mulyandani, V. C. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran (Studi Kasus Pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Kementerian PUPR). *Indonesian …*, *1*(1), 119–129.

Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, *1*(2), 081–090. https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918

Purwanto dan Sulistyastuti. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial Bidang Ilmu Administrasi*. Gajah Media.

Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, *1*(1), 180–189.

Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill," 8*(2), 192–202. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947

Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations (Ideas and interest)* (S. University (Ed.); Third Edit). Sage Publictions.

Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *International NGO Forum on Indonesian Development*, *2*(September), 1–25.

Siregar, B. dan B. S. (1996). *Akuntansi Pemerintahan dengan sistem dana* (Edisi kedu). BPFE.

Sriati. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Sriwijaya.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. CV:Alfabeta.

Suparmoko, M. (2012). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. BPFE.

Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal. (2020). *Analysis of the Factors That Affects the Budget Absorption in the Riau and*. *4*(2).

Trisna et al. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun Anggaran 2019. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, *2*(2), 149–162.

Undang-Undang No 17. (2003). *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang No 23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Wiansyah & Mulyani. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, *5*(2), 212–228.

Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Bisma*, *11*(2), 194. https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6314